

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anonim., *Ensiklopedia Nasional Indonesia* Jilid 2, Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 2018.
- Bachtiar., *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang, UNPAM PRESS, 2018.
- Djuhaendah, Hasan., *Hukum Keluarga*. Bandung, Armico, 1998.
- Hasan Bisri. Cik, *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku Balai Harta Peninggalan Semarang*, 2022.
- Munawwir, Ahmad., *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta, Pondok Pesantren Al-Munawir, 2014.
- Peter, Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Raihan, Rasyid., *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nasution., *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung, PT Tarsito, 1968.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2012
- Soemiyati., *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang - undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2006.
- Soetojo, Raden *Hukum Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press, 2010.
- Soimin, Soedaryo., *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2009.
- Subekti., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Yogyakarta, PT Intermasa, 1985
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. UGM, Yogyakarta
- Triwulan Tutik, Titik., *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2018.

-----., *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987 tentang Penghapusan Perwakilan Balai Harta Peninggalan di Seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6339)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100).

PENETAPAN PENGADILAN

Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 69/Pdt.P/2023/PN.Slt tentang Perwalian Anak.

JURNAL

E, Heriyani, dan Yuniarlin., “Fungsi Bhp sebagai Wali Pengawas terhadap Anak di Bawah Perwalian dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Kasus di Bhp Semarang)”, *Jurnal Media Hukum.*, 2015.

N.F,Utami, dan Indrawati, S., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali”, *Amnesti Jurnal Hukum*, 2022.

Rahmawati, E. dan Wardani, W.I, “Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Di Bawah Umur,

Notary Law Research, 2021.

Yulita Dwi Pratiwi, “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.

INTERNET

Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. “Sejarah Singkat BHP”. <https://jakarta.kemenkumham.go.id/profil/upt/2726-profil-bhpjakarta> (diakses 25 Maret 2024).

Jakarta Kemenkumham, “Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur”. <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/permohonan-perwalian-anak-di-bawah-umur> (diakses 2 juni 2024).

TESIS

B, Da Cruz., “Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Harta Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)”, *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Syuhada, “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan)”, *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2009.